

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2018



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah atas segala nikmat, petunjuk dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), berisi Indikator Kinerja yang merupakan Indikator sasaran atas rencana kerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 mensyaratkan pula adanya penilaian pencapaian sasaran, (target) yang ditetapkan dalam indikator ini yang berfungsi sebagai acuan dalam proses evaluasi kinerja pemerintah.

Kami berupaya untuk dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun 2018 dengan tepat waktu dan bermutu. Namun demikian, kami pun menyadari bahwa penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, tanggapan, saran dan masukan yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*) sangat kami harapkan sehingga tujuan kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) bisa segera tercapai.

Tasikmalaya, Maret 2019
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA TASIKMALAYA



YONO S KARSO, SH, MP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600806 198603 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.4 Struktur Organisasi	5
1.5 Sistematika Pelaporan	8
BAB II. RENCANA STRATEGIS	9
2.1. Visi, Kota Tasikmalaya	9
2.2. Misi Kota Tasikmalaya	11
2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14
2.4. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman.....	21
2.4.1. Strategi	21
2.4.2. Arah Kebijakan	22
2.5. Nilai-nilai Luhur	27
2.6. Isu-isu Strategis	27
2.7. Tujuan dan sasaran	31
2.7.1. Tujuan	31
2.7.2. Sasaran	31
2.7.3. Cara Mencapai Tujuan & sasaran	32
2.7.3.1. Kebijakan	32
2.6.3.2. Program	33
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Evaluasi Kinerja	40
3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	40
3.1.2. Indikator Kinerja	41
3.1.3. Evaluasi Kinerja	43
3.1.3.1. Pengukuran Kinerja	44
2.1.3.2. Evaluasi dan Analisa Akuntabilitas Kinerja	45
3.2 Analisa Pencapaian Kinerja	47
3.2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan	47
3.2.2. Evaluasi Pencapaian Kinerja Kegiatan	48
BAB IV. PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Permasalahan	60

4.2.1. Sumber Daya Manusia	60
4.2.2. Peralatan	61
4.3 Strategi Pemecahan Masalah	61
4.3.1. Sumber Daya Manusia	61
4.3.2. Peralatan	61

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Data Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Tabel 1.2 : Keadaan Pegawai Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Tabel 2.1 : Tujuan, dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Tabel 2.2 : Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah 2017-2022
- Tabel 2.3 : Target Tujuan, Uraian sasaran dan Indikator sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022
- Tabel 2.4 : Capaian Kinerja Tahun 2018
- Tabel 2.5 : Perbandingan Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018
- Tabel 3.1 : Target dan Realisasi Indikator Kinerja pada sasaran I Thn 2018
- Tabel 3.2 : Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Indikator Sasaran I.
- Tabel 3.3 : Target dan Realisasi Indikator Kinerja pada sasaran II Thn 2018
- Tabel 3.4 : Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Indikator Sasaran II.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and service* sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Setiap instansi pemerintah, termasuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggungjawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas tersebut. Untuk melaksanakan mandat ini perlu adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur yang sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada suatu instansi pemerintah. Dimana akuntabilitas dimaksud adalah merupakan suatu perwujudan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya sebagai suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang baik sangat bermanfaat untuk:

- a. Peningkatan akuntabilitas instansi,
- b. Umpan balik bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah,
- c. Peningkatan perencanaan di segala bidang baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi instansi,
- d. Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi,
- e. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi,
- f. Mendorong instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Peraturan presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- e. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 8)
- g. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
- h. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- i. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.
- j. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
- k. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa kedudukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perkumuhan Kota Tasikmalaya adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas pokoknya adalah Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan serta sebagian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perkumuhan Kota Tasikmalaya terdiri dari :

- a. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan serta sebagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan Air Minum, Air Limbah dan permukiman;

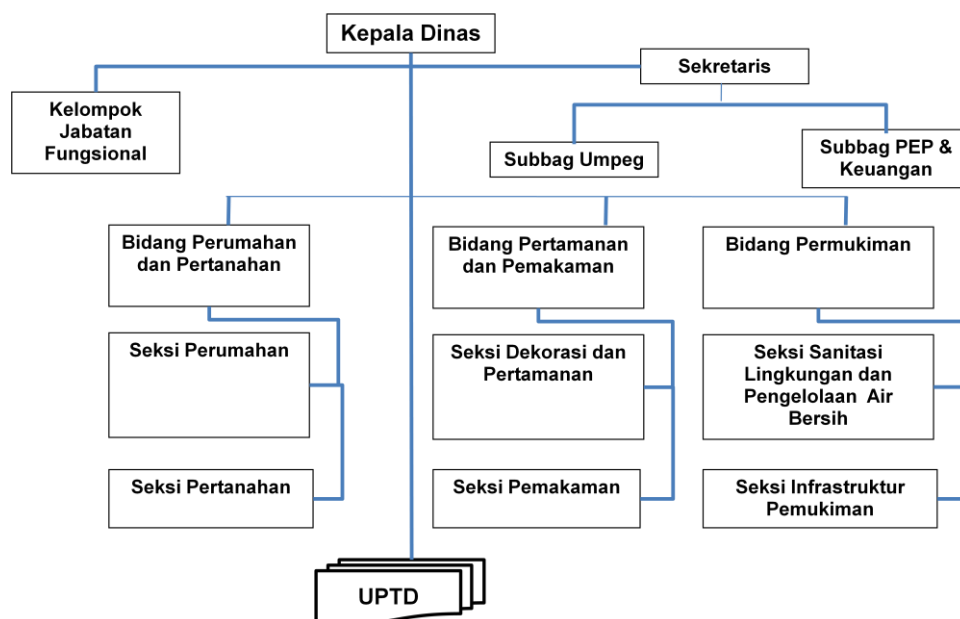
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan-urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan serta sebagian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan Air Minum, Air Limbah dan permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

1.4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perkumuhan Kota Tasikmalaya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Perumahan dan Pertanahan, membawahi:
 - 1. Seksi Perumahan
 - 2. Seksi Pertanahan
- d. Bidang Pertamanan dan Pemakaman membawahi:
 - 1. Seksi Pertamanan dan Dekorasi
 - 2. Seksi Pemakaman
- e. Bidang Permukiman, membawahi:
 - 1. Seksi Sanitasi Lingkungan dan Pengelolaan Air Bersih
 - 2. Seksi Infrastruktur Lingkungan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah SPALD

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya dibawah ini:



Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya

Untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari, pada saat ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya sampai dengan Desember Tahun 2018 berjumlah 65 orang. Keadaan pegawai berdasarkan unit organisasi adalah sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Data Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya

No	Unit Organisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Dinas	1		1
2	Sekretariat	9	5	14
3	Bidang Perumahan dan Pertanahan	4	2	6
4	Bidang Pertamanan dan Pemakaman	26	1	27
5	Bidang Permukiman	16	1	17
JUMLAH TOTAL		56	9	65

Keadaan pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya berdasarkan jabatan adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.2

Keadaan Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN/ESELON	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas / Eselon II b	1		1
2.	Sekretaris / Eselon III a	1		1
3.	Kepala Bidang / Eselon III b	2	1	3
4.	Kepala Sub Bagian / Es. IV a	1	1	2
5.	Kepala Seksi / Eselon IV a	5	1	6
6.	Pelaksana PNS	46	6	52
J u m l a h		56	9	65

1.5. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika laporan
- BAB II : Rencana Strategik, berisi uraian mengenai Visi, Misi dan Nilai-nilai Luhur, Visi, Misi, Nilai-nilai Luhur, Isu-isu Strategis, Tujuan dan Sasaran
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja, menguraikan penjelasan tentang Evaluasi Kinerja dan Analisa Pencapaian Kinerja
- BAB IV : Penutup, merupakan tahap akhir dari rangkaian penjelasan dari keseluruhan bab, meliputi Kesimpulan, Permasalahan. Dan Strategi Pemecahan Masalah

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya bahwa alur pikir perencanaan dimulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan pada bab II ini akan diuraikan tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang sudah digariskan dalam Renstra Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi, tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi menunjukkan kondisi yang ingin dicapai serta berdasarkan pada isue dan analisis strategis. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan

2.1. Visi Kota Tasikmalaya

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2017-2022 adalah :

“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”

Visi tersebut mengandung makna :

Religius : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Maju : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan

Madani : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan untuk mencapai suatu

kondisi, sikap dan perilaku yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh stakeholder dan komponen yang ada di Kota Tasikmalaya dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan wujudkan.

2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan serta berpegang teguh pada tata nilai, norma, moral dan agama serta memiliki akhlak dan karakter yang baik dan mulia. Menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang baik dan luhur.

Misi ke-2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk terus mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan

perlindungan sosial serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Memperkuat kondisi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengurangi kesenjangan, pengurangan pengangguran memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi lokal, peningkatan sarana prasarana perekonomian, membuka investasi dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, peningkatan akses untuk permodalan dan pemasaran, sehingga kondisi perekonomian dan daya beli serta daya saing masyarakat meningkat, tumbuh dan merata.

Misi ke-3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar perkotaan harus berkembang, merata dan berkelanjutan diseluruh wilayah, menyediakan infrastruktur publik yang representatif, kuat, aman dan nyaman, ramah terhadap lingkungan, anak, disabilitas dan lansia. Infrastruktur yang mampu menunjang terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta didukung oleh formulasi dan sesuai dengan penataan ruang yang baik.

Misi ke-4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga yang kuat, bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut, yaitu :

Misi ke-3 yaitu "Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan"

- **Tujuan ke-5 (T5) yaitu "Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan"**
- **Sasaran ke-7 (S7) yaitu "Meningkatnya layanan infrastruktur dasar perkotaan yang aman, nyaman dan inklusif"**
- **Program ke-12 (P12) yaitu "Program pemantapan infrastuktur dasar perkotaan"**
- **Sasaran ke-8 (S8) yaitu "Meningkatnya kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat"**
- **Program ke-13 (P13) yaitu "Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)"**
- **Sasaran ke-9 (S9) yaitu "Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan"**
- **Program ke-14 (P14) yaitu "Tasik Resik"**

Misi ke-5 yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih"

- Tujuan ke-8 (T8) yaitu **"Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi"**
- Sasaran ke-15 (S15) yaitu **"Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi"**
- Program ke-20 (P20) yaitu **"Program Tasik layanan prima (Profesional, Responsif, Inovatif, Memuaskan dan Akuntabel"**
- Sasaran ke-16 (S16) yaitu **"Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah"**
- Program ke-21 (P21) yaitu **"Program peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan dan aparatur"**

Berkenaan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang telah dipaparkan, selanjutnya disusun indikator kinerja, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA TASIKMALAYATAHUN 2017-2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman di lingkungan Kota Tasikmalaya	Meningkatnya rumah layak huni dan ruang terbuka hijau	Capaian penanganan rumah tidak layak huni	%		8.60	16.59	24.59	32.59	40.59
			Luasan Penanganan Ruang Terbuka Hijau	%	27,82	28	50	67	83	100
			Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	44,60	52,70	59,81	65,25	70,67	76,11

2	Meningkatnya kualitas pertamanan dan pemakaman yang refresentatif	bertambahnya lokasi taman dan tertatanya makam yang ada.	Persentase pertamanan dan pemakaman yang refresentatif	%		41,03	73,08	84,62	98,08	100
3	Meningkatnya pelayanan ke Ciptakarya	Meningkatnya kualitas pelayanan ke Ciptakarya	Capaian IKM perangkat daerah	%		76,6	76,6	88,31	88,31	88,31
4	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	%		61	71	71	81	81
			Maturitas SPIP perangkat daerah	Level		2	3	3	3	4

2.4. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD

2.4.1. Startegi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan dan penataan kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat melalui pelaksanaan program gema manasik
2. Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan melakukan penataan dan pemanfaatan pertanahan dan kawasan pertamanan sebagai ruang terbuka hijau melalui

pelaksanaan program tasik resik

2.4.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Penurunan luasan kawasan kumuh dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman, perbaikan infrastruktur dan sanitasi lingkungan, serta rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan mendorong peran serta masyarakat
2. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau dan ruang publik dengan penataan kawasan perumahan, pembangunan dan penataan taman kota.

Untuk lebih mempertajam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya, maka arah kebijakan dari masing-masing strategi guna menjawab permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang berkembang diuraikan sebagaimana tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

VISI	KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI		
MISI 3	Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan		
TUJUAN 5	Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan		
SASARAN 8	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat		
PROGRAM 13	Gema Manasik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3 :			
T.1. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman di lingkungan Kota Tasikmalaya	S8. Meningkatnya rumah layak huni dan ruang terbuka hijau	Meningkatkan pembangunan dan penataan kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat melalui pelaksanaan program gema manasik	Penurunan luasan kawasan kumuh dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman, perbaikan infrastruktur dan sanitasi lingkungan, serta rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan mendorong peran serta masyarakat

VISI	KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI		
MISI 3	Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan		
TUJUAN 5	Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan		
SASARAN 8	Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan		
PROGRAM 13	Tasik Resik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T.1. Meningkatnya kualitas pertamanan dan pemakaman yang representatif	S8. bertambahnya lokasi taman dan tertatanya makam yang ada.	Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan melakukan penataan dan pemanfaatan pertanahan dan kawasan pertamanan sebagai ruang terbuka hijau melalui pelaksanaan program tasik resik	Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau dan ruang publik dengan penataan kawasan perumahan, pembangunan dan penataan taman kota

VISI	KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI		
MISI 5	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH		
TUJUAN 8	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi		
SASARAN 15	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi		
PROGRAM 20	Tasik Layanan Prima (Profesional, responsif, inovatif memuaskan dan akuntabel)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
T.8. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi	S15. Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui program tasik layanan prima	Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
	S16. Meningkatkan sistem akuntabilitas pengelolaan	Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan,	Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan

VISI	KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI		
MISI 5	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH		
TUJUAN 8	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi		
SASARAN 15	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi		
PROGRAM 20	Tasik Layanan Prima (Profesional, responsif, inovatif memuaskan dan akuntabel)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	keuangan dan kinerja daerah	penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui pelaksanaan program peningkatan kinerja keuangan dan aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja	penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional dan akuntabel, peningkatan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah

2.5. Nilai-nilai Luhur

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya merupakan salah satu perangkat/lembaga teknis daerah di lingkungan Kota Tasikmalaya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota untuk melaksanakan tugas di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan serta sebagian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan serta sebagian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..

Dengan visi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dan proposional sehingga terciptanya pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya sesuai dengan yang diharapkan.

2.6. Isue-Isue Strategis

Pembangunan di Kota Tasikmalaya pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005- 2025, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya tahun 2018, yang diselesaikan secara bertahap melalui rencana kerja satuan kerja Pemerintah Daerah (Rencana Kerja SKPD) guna terwujudnya visi Kota Tasikmalaya .

Dalam upaya untuk melaksanakan Rencana Strategis Pembangunan Kota Tasikmalaya, terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang bersifat aktual dan berhak mendapat perhatian untuk di atasi, khususnya guna kepentingan merealisasikan target-target pembangunan sebagaimana di amanatkan dalam rencana strategis Kota Tasikmalaya. Atas dasar berbagai permasalahan dan tantangan yang berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya setelah melalui proses kristalisasi dapat di kemukakan menjadi isu-isu strategi pembangunan yang harus menjadi agenda dan fokus pembangunan Kota Tasikmalaya. Hal tersebut di nilai menjadi strategis dikarenakan keterkaitannya dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat yang merupakan permasalahan yang berdampak cukup kuat terhadap tatanan kehidupan masyarakat serta relevansi yang kuat terhadap pencapaian visi dan misi Kota Tasikmalaya.

Adapun isu-isu strategis yang perlu dijadikan landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan

Belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur perkotaan seperti drainase kota, guna menghindari terjadinya genangan-genangan air pada waktu hujan baik pada badan jalan maupun pada kawasan pemukiman penduduk.

2. Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman

Perkembangan kawasan perumahan dan pemukiman penduduk seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk, perlu diantisipasi guna menghindari muncul

dan berkembangnya kawasan-kawasan kumuh yaitu dengan melakukan penataan maupun penyediaan berbagai prasarana lingkungan yang mandiri.

3. Peningkatan untuk sarana Pemakaman Umum

Peningkatan prasarana dan sarana Tempat Pemakaman Umum (TPU), milik pemerintah yang ada (TPU Cieunteung, TPU Cinehel dan Aisha Rashida) sangat terbatas. Demikian pula halnya lokasi pemakaman Aisha Rasida belum dimanfaatkan secara optimal, karena terkendala jarak.

4. Peningkatan penanganan pelestarian Ruang Terbuka Hijau

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dihadapkan pada persoalan-persoalan semakin menurunnya daya dukung lingkungan seperti pemeliharaan, pengamanan, pelestarian dan penanaman pohon pelindung yang masih belum tertangani secara baik.

5. Masih luasnya kawasan pemukiman kumuh

Melakukan revitalisasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya sarana yang kurang memadai seperti: air bersih, air limbah, drainase, jaringan jalan, dan lain-lain

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam revitalisasi kawasan permukiman kumuh. Hendaknya partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada pelaksanaan program saja. Namun dilibatkan pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan dan pemeliharaan akan sangat membantu dalam mewujudkan tujuan dari pada pembangunan itu sendiri.

Mengatasi adanya data yang dinamis untuk penetapan sasaran program. Hal ini menuntut stakeholder harus senantiasa melakukan pendataan secara kontinyu terhadap masyarakat miskin. Hal tersebut akan mudah jika melibatkan perangkat kelurahan setempat untuk melakukan pendataan secara langsung terhadap rumah yang tak layak huni pada tiap-tiap KK. Adapun seharusnya memanfaatkan fasilitator di setiap kecamatan/kelurahan untuk memudahkan akses database kepada stakeholder sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Mengubah pola pikir masyarakat yang cenderung lebih memilih bantuan berupa uang daripada material. Hal ini dilakukan dengan upaya untuk mengurangi bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

6. Masih banyaknya rumah tidak layak huni
7. Masih belum optimalnya capaian rumah tangga yang dapat mengakses air minum, dan pengelolaan limbah domestic
8. Masih terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan formal yang belum diserahterimakan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya
9. Masih adanya permasalahan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan (*backlog*) perumahan

2.7. Tujuan dan Sasaran

2.7.1. Tujuan

Penyusunan strategi kebijakan dan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai dimensi kebijakan yang didasari atas kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang kewenangan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Hal ini sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada, adapun tujuan penyusunan strategi kebijakan dan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan mengintegrasikan berbagai aspirasi masyarakat dari berbagai stakeholder yang berkaitan dengan tupoksi dinas dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya.
2. Menyusun Rencana Strategis Dinas.
3. Sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dinas.

2.7.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, adalah sebagai berikut :

1. Terumusnya dan terintegrasikannya berbagi aspirasi masyarakat dari berbagai stakeholder yang berkaitan

dengan tupoksi Dinas dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kota Tasikmalaya.

2. Tersusunnya Rencana Strategis Kebijakan Tahunan Dinas.
3. Tersusunnya rencana anggaran dinas.

2.7.3. Cara Mencapai tujuan dan sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategis. Cara pencapaian tujuan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program oprasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi yang dibangun ini dilandaskan kepada informasi dan data yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi diwujudkan dalam bentuk kebijakan serta program dan kegiatan, sebagaimana akan dikemukakan dibawah ini

2.7.3.1. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok untuk dapat dilaksanakan dan tidak hanya baik secara teori.

Serangkaian kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh jajaran staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan arah ruang lingkup dan sasaran tujuan serta penetapan dan penggunaan sumber daya dan dana yang ada.

Kebijakan-kebijakan yang ada merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Tasikmalaya serta kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman itu sendiri, sesuai dengan kewenangan yang ada.

Kebijakan-kebijakan tersebut adalah :

1. Usaha peningkatan PAD melalui penerimaan retribusi secara intensif;
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Optimalisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Penanaman pohon dan pemeliharaan taman kota dan jalur hijau;
5. Penataan TPU muslim dan peningkatan pelayanan pemakaman kepada masyarakat;
6. Menata dan menyediakan berbagai prasana lingkungan permukiman;

2.7.3.2. Program

Dalam rangka mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian program dan kegiatan telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan dilaksanakan dalam masa mendatang merupakan kumpulan kegiatan yang merupakan rencana

aksi. Suatu program yang telah ditetapkan mungkin saja akan mencapai satu atau lebih sasaran.

Beberapa program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan Tahun Anggaran 2018, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan Kerja
6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
7. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
8. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pertamanan dan Pemakaman
9. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman
10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
11. Program Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan (Tata Kota)
12. Program Pembangunan/Rehabilitasi Kirmir/Tembok Penahan Tebing (TPT)
13. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 2.3
Tujuan, Uraian Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Tasikmalaya 2017-2022

No	Tujuan	Uraian Sasaran	Indikator sasaran	Target 2017-2022				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat	Capaian penanganan rumah tidak layak huni	8,60	16,60	24,60	32,59	40,59
			Luasan Penanganan Ruang Terbuka Hijau	27,78	50,00	66,67	83,33	100
			Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	52,70	59,81	65,25	70,67	76,11
			Jumlah PSU yang diserahkan dan Jumlah PSU yang diverifikasi	10 terverifikasi dan 10 serah terima	20 terverifikasi dan 10 serah terima	20 terverifikasi dan 10 serah terima	20 terverifikasi dan 10 serah terima	20 terverifikasi dan 10 serah terima
			Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	1,075	100	1000	1000	1000
			Capaian pengelolaan data pertanahan	10	20	20	20	20
			Jumlah Lokasi yang didekorasi yang ditangani	2	2	2	2	2

			Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	18,75	21,62	19,07	20,25	31,50
			Capaian drainase pemukiman dalam kondisi baik	20	20	20	20	20
			Capaian realisasi KK yang berakses SPAL terhadap total KK	41,17	41,30	41,43	41,56	41,69
			Cakupan KK berakses layanan air minum	53,27	53,77	54,27	54,77	55,27
		Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase pertamanan dan pemakaman yang representatif	41,03	73,08	84,62	98,08	100
			Jumlah area pemakaman yang representatif	2	3	3	3	3
			Jumlah Lokasi yang didekorasi dan ditangani	3	8	6	7	1

Tabel 2.4
 Capaian Kinerja Tahun 2018
 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Kota Tasikmalaya

No	Tujuan	Uraian Sasaran	Indikator sasaran	Target dan Realisasi Tahun 2018	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat	Capaian penanganan rumah tidak layak huni	8,60	26,66
			Luasan Penanganan Ruang Terbuka Hijau	27,78	44,44
			Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	52,70	61,65
			Jumlah PSU yang diserahkan dan Jumlah PSU yang diverifikasi	10 terverifikasi dan 10 serah terima	5 terverifikasi dan 31 serah terima
			Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	1,075	3,333
			Capaian pengelolaan data pertanahan	10	10
			Jumlah Lokasi yang didekorasi yang ditangani	2	2
			Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	18,75	25,16
			Capaian drainase pemukiman dalam kondisi baik	20	20,77

			Capaian realisasi KK yang berakses SPAL terhadap total KK	41,17	58,65
			Cakupan KK berakses layanan air minum	53,27	53,33
		Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase pertamanan dan pemakaman yang representatif	41,03	44,87
			Jumlah area pemakaman yang representatif	2	2
			Jumlah Lokasi yang didekorasi dan ditangani	3	4

Tabel 2.5
Perbandingan Kinerja Tahun 2018
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Tasikmalaya

No	Tujuan	Uraian Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Kinerja		Capaian (2018-2017)
				2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat	Capaian penanganan rumah tidak layak huni		26,66	
			Luasan Penanganan Ruang Terbuka Hijau	31	44,44	13,44
			Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	40,60	61,65	21,05

		Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase pertamanan dan pemakaman yang representatif	20	44,87	24,87
--	--	--	--	----	-------	-------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Evaluasi Kinerja

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Tasikmalaya. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Disamping itu, pengukuran kinerja harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu, dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi bahkan dapat diperbandingkan dengan instansi sejenis, sehingga penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan secara lebih objektif.

3.1.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja sasaran secara lengkap dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja pada Tabel 3.1. Dimana berdasarkan lampiran tersebut terlihat bahwa tidak seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2018 mempunyai nilai realisasi mencapai rencana tingkat capaian (target), hal ini ditunjukkan oleh presentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk masing-masing sasaran.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai implementasinya, dilakukan evaluasi kinerja dan analisa pencapaian kinerja. Setelah program disusun sebagaimana tercantum dalam RPJMD, diciptakan indikator kinerja atau ukuran keberhasilan pelaksanaan program sehingga dengan demikian dapat diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilannya.

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara Perencanaan Strategis dengan Akuntabilitas, suatu

instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator yang mengarah pada pencapaian misi, tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian misi Kota Tasikmalaya. Sebaliknya dengan tersusunnya perencanaan strategis yang jelas, perencanaan operasional yang terukur, maka diharapkan tersedia pembenaran yang logis dan argumentatif yang memadai untuk menyatakan bahwa suatu pelaksanaan program berhasil atau tidak.

Untuk dapat mengukur pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018, maka ditetapkan indikator-indikator kinerja dengan pendekatan sebagai berikut :

a. Indikator Input (masukan)

Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output) misalnya : dana, SDM, kebijakan, peraturan perundang-undangan, sarana prasarana dan lain-lain

b. Indikator Output (keluaran)

Adalah sesuatu yang diharapkan langsung di capai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

c. Indikator Outcomes (Hasil)

Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan.

d. Indikator Benefit (Manfaat)

Adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan atau suatu keluaran yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat

e. Indikator Benefit (Dampak)

Adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Di bawah ini dijelaskan hasil Evaluasi Kinerja, Analisa Pencapaian Kinerja dan Aspek Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

3.1.3. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktifitas di masa yang akan datang, sebagai proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran. Evaluasi kinerja digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat di nilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis terhadap kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antar output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi

karena realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan target ataupun realisasi masukan sesuai dengan target diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari target hal ini menunjukkan bahwa realisasi mengikuti target.

Analisis efektifitas menggambarkan tingkat penyesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil, selain itu analisis efektifitas juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap, maupun strategi penyelesaian masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

3.1.3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari penilaian secara sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output), indikator keluaran adalah segala sesuatu berupa produk/jasa sebagai hasil langsung yang dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan non fisik, indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran kegiatan pada jangka menengah. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan atau suatu keluaran yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, indikator

dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut maka penilaian tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam rangka pengukuran kinerja terdapat tahapan-tahapan penetapan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan dilakukan dengan menggunakan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu :

- 1). Data Internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi;
- 2). Data Eksternal, berasal dari luar baik data primer maupun data sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, (2) Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja.

3.1.3.2. Evaluasi dan Analisa Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas di masa yang akan datang.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan hasil, manfaat atau dampak, selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pencegahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Adapun analisa akuntabilitas kinerja adalah uraian hasil pengukuran kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi. Dalam analisis ini dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran dalam tahun 2018 yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam upaya mewujudkan visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan tersebut, maka dirumuskan misi yang harus diimplementasikan sebagai berikut :

- a. Mengurangi luasan kawasan pemukiman kumuh;
- b. Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni;
- c. Mengoptimalkan capaian rumah tangga yang dapat mengakses air minum, dan pengelolaan limbah domestik;
- d. Menambah penyediaan ruang publik/taman-taman kota;
- e. Bertambahnya Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Tasikmalaya;
- f. Menambah fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan formal yang belum diserahterimakan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- g. Memberikan pelayanan serta penataan taman kota, jalur hijau dan fasilitas pemakaman.

3.2. Analisa Pencapaian Kinerja

3.2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan yang bersumber dari (APBD Kota, APBD Prov dan APBN), maka dapat dikemukakan bahwa tidak seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2018 mempunyai nilai realisasi sesuai dengan nilai rencana tingkat capaian (target). Hal ini ditunjukkan oleh persentase pencapaian rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator

kinerja kegiatan (*inputs*/masukan, *outputs*/keluaran, *outcomes*/hasil, *benefit*/manfaat, dan *impact*/dampak).

3.2.2. Evaluasi Pencapaian Kinerja Kegiatan

Evaluasi Pencapaian Kinerja Kegiatan adalah capaian kinerja suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu yang menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Sesuai dengan indikator kinerja dan capaian kinerja maka diperoleh capaian kinerja kegiatan.

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat

Sasaran I terdiri dari 3 Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja 2017-2018
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Tasikmalaya

No	Tujuan	Uraian Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Kinerja		Target Akhir RPJMD
				2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat	Capaian penanganan rumah tidak layak huni (%)		26,66	40,59
			Luasan Penanganan Ruang Terbuka Hijau (%)	31	44,44	100
			Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)	40,60	61,65	76,11

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

- ❖ Target Persentase Capaian penanganan rumah tidak layak huni Tahun 2018 adalah sebesar 8,60 %.

Sedangkan realisasi Persentase Capaian penanganan rumah tidak layak huni tahun 2018 sebesar 26,66%. Tercapainya target Persentase Capaian penanganan rumah tidak layak huni

Kebijakan peningkatan Persentase Capaian penanganan rumah tidak layak huni dilakukan melalui berbagai upaya sumber pendanaan yang berasal dari batuan APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN.

JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2018						
No	Kecamatan	RTLH Kota	Rutila hu Prov	BSPS	Bankeu Gub	Jumlah
1	Bungursari	71	200	43	6	320
2	Cibeureum	95			6	101
3	Cihideung	62	285		6	353
4	Cipedes	55	50		6	111
5	Indihiang	73	300	58	6	437
6	Kawalu	129	50	150	6	335
7	Mangkubumi	86	350	52	6	494
8	Purbaratu	64	200		6	270
9	Tamansari	131	350	106	9	596
10	Tawang	60	250		6	316
	Jumlah	826	2,035	409	63	3,333

- ❖ Target Persentase Luasan Penanganan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018 adalah sebesar 28%.

Sedangkan realisasi Luasan Penanganan Ruang Terbuka Hijau tahun 2018 sebesar 44,44%. Tercapainya target Luasan Penanganan Ruang Terbuka Hijau dikarenakan Kebijakan peningkatan Persentase Luasan Penanganan Ruang Terbuka Hijau dilakukan melalui berbagai upaya sumber pendanaan yang berasal dari bantuan APBD Kota dan APBD Provinsi.

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Persentase Luasan Penanganan Ruang Terbuka Hijau sangat mungkin untuk mengatasi permasalahan persentase Luasan Penanganan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya. dengan penataan taman-taman dan pemakaman di Kota Tasikmalaya antara lain:

- Penataan Taman Depan Mesjid Agung
- Taman Dadaha
- Median Jalan HZ. Mustopa
- Median Jalan Ardiwinangun
- Tugu Adipura
- Lampu Cika-cika
- TPU Cieunteung
- TPU Aisha Rashida

- ❖ Target Persentase Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani Tahun 2018 adalah sebesar 52,70%.

Sedangkan realisasi Persentase Capaian Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani tahun 2018 sebesar 61,65 %. Tercapainya target Persentase

Capaian Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani.

Kebijakan peningkatan Persentase Capaian Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani dilakukan melalui berbagai upaya sumber pendanaan yang berasal dari batuan APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN.

REKAPITULASI PENGURANGAN KUMUH KOTA TASIKMALAYA

No	Kecamatan	Σ Luas Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh (Ha)			Sisa Luasan Kumuh (Ha)
			Tahun 2017	Tahun 2018	TOTAL	Tahun 2019
1	Cipedes	20,16	3.68	10.02	13.7	8.72
2	Indihiang	11,73	0	2.77	2.77	5.15
3	Mangkubumi	2.78	0	0.92	0.92	1.46
4	Tamansari	7.49	0	7.49	7.49	0
5	Cihideung	3.28	0	0.84	0.84	2.94
6	Cihideung	35.77	1.73	8.73	10.46	22.32
7	Cihideung	22.70	0.6	8.74	9.34	5.8
8	Cipedes	9,83	1.5	3.7	5.2	6.64
9	Indihiang	3,62	0	1	1	1.53
10	Indihiang	20.15	1.33	2.12	3.45	16.67
11	Tawang	23,08	0	5.8	5.8	7.5
12	Tawang	5,27	2.1	2.77	4.87	4.14
13	Kawalu	15.59	0	15.15	15.15	0
14	Kawalu	5,27	0	4.22	4.22	0
15	Bungursari	7,32	1.08	0.79	1.87	6.43
16	Mangkubumi	9.4	0.56	0.58	1.14	8.26
17	Mangkubumi	4,98	0	1.56	1.56	4.26
18	Mangkubumi	5.91	0	1.81	1.81	4.1
Total		276,17	12.58	79.01	91.59	105.92

Dalam rangka pencapaian Indikator tersebut diatas dilaksanakan beberapa program/kegiatan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 3.2
Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Indikator Sasaran I
Tahun Anggaran 2018

No	Prog/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	150.000.000	141.300.000	94,20
1	Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Kecamatan Tawang Kecamatan Cihideung, Kecamatan Bungursari	50.000.000	47.200.000	94,40
2	Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Kecamatan Kawalu Kecamatan Mangkubumi	100.000.000	94.100.000	94,10
II	Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pertamanan dan Pemakaman	1.500.000.000	1.449.591.750	98,10
3	Penataan Taman Jalan Dadaha	430.000.000	422.065.000	98,15
III	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman	100.439.425.000	90.492.586.728	90,10
4	Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Cipedes	347.525.000	343.064.000	98,72
5	Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Kawalu	530.000.000	528.613.000	99,74
6	Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Tamansari	700.000.000	692.100.000	98,87
7	Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Mangkubumi	290.000.000	289.057.000	99,67
8	Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Indihiang	295.000.000	294.037.000	99,67
9	Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Cihideung	310.000.000	308.866.000	99,63

10	Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Tawang	674.900.000	672.553.000	99,65
11	Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Purbaratu	375.000.000	373.907.000	99,71
12	Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Bungursari	360.000.000	358.999.000	99,72
13	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Bungursari	6.365.000.000	6.343.090.000	99,66
14	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Cipedes, Kecamatan Indihiang	7.955.000.000	7.923.571.000	99,60
15	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Tamansari, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Purbaratu	11.595.000.000	11.554.537.000	99,65
16	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi	9.645.000.000	9.542.897.000	98,94
17	Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	846,000,000	841,340,000	99.45
18	Penataan Lingkungan Pemukiman	300,000,000	297,102,000	99.03
19	Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman	4,321,000,000	4,112,600,000	95.18
20	Penyelenggaraan Kegiatan Kotaku	230,000,000	216,008,477	93.92
21	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kota Tasikmalaya	2,550,000,000	2,542,001,000	99.69
22	Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Tasikmalaya	150,000,000	140,613,000	93.74
23	Penanganan Kawasan Kumuh Kota Tasikmalaya (Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya)	4,900,000,000	3,382,586,000	69.03

24	Pembangunan Kirmir Kecamatan Tamansari Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Purbaratu	400,000,000	393,383,000	98.35
25	Pendampingan Bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Tasikmalaya	200,000,000	192,713,411	96.36
26	Penataan infrastruktur kawasan permukiman wilayah kelurahan gunungtanda kecamatan kawalu Kota Tasikmalaya	800,000,000	794,771,000	99.35
27	Penataan infrastruktur kawasan permukiman wilayah Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari	700,000,000	694,364,000	99.19
28	Penataan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Indihiang	5,000,000,000	4,975,544,000	99.51
29	Pembangunan saluran drainase lingkungan permukiman	900,000,000	161,437,000	17.94
30	Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman	4,100,000,000	4,092,480,500	99.82
31	Peningkatan Infrastruktur Drainase Lingkungan Permukiman di Kota Tasikmalaya	5,000,000,000	3,504,865,840	70.10
32	Pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana di permukiman kumuh Kota Tasikmalaya	2,000,000,000	1,615,145,500	80.76
33	Pembangunan dan rehabilitasi Drainase lingkungan permukiman di wilayah Kota Tasikmalaya	3,000,000,000	2,984,171,101	99.47
34	peningkatan sarana/prasarana lingkungan perumahan dan permukiman di Kota Tasikmalaya	1,500,000,000	1,488,800,000	99.25
35	peningkatan infrastruktur jalan lingkungan permukiman di Kota Tasikmalaya	3,000,000,000	2,990,296,500	99.68
36	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)	1,000,000,000	994,764,755	99.48

37	peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	2,000,000,000	1,994,146,500	99.71
38	pembangunan jalan lingkungan dan pembangunan kirmir lingkungan permukiman Kota Tasikmalaya	3,000,000,000	2,986,295,500	99.54
39	peningkatan infrastruktur drainase lingkungan permukiman di Kota Tasikmalaya	3,000,000,000	2,798,371,144	93.28
40	peningkatan rehabilitasi jalan lingkungan dan pembangunan drainase lingkungan perumahan dan permukiman wilayah Kota Tasikmalaya	4,000,000,000	3,987,251,500	99.68
41	Penyusunan DED Jalan Lingkungan Kota Tasikmalaya	25,000,000	24,750,000	99.00
42	Penyusunan DED Drainase, Sanitasi dan Air Bersih Permukiman Kota Tasikmalaya	75,000,000	72,280,000	96.37
43	Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan Permukiman Wilayah Kecamatan Mangkubumi (Bantuan Provinsi Tahun 2018)	1,000,000,000	227,875,000	22.79
44	Penataan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Kel. Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2018)	2,000,000,000	110,759,000	5.54
45	Peningkatan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2018)	2,000,000,000	1,435,716,000	71.79
46	Penataan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2018)	1,000,000,000	272,771,000	27.28
47	Peningkatan Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman Wilayah Kecamatan di Kota Tasikmalaya (Bantuan Provinsi Tahun 2018)	2,000,000,000	942,093,000	47.10
IV	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5,770,096,000	4,703,147,648	81.51

48	JAKSTRADA (Kebijakan Dan Strategi Daerah) Pelayanan Air Minum	50,000,000	46,400,000	92.80
49	Peningkatan Sanitasi Lingkungan Pemukiman Kota Tasikmalaya	291,731,000	289,453,000	99.22
50	Rehabilitasi Prasarana IPLT Singkup	225,000,000	220,819,000	98.14
51	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Truck Tinja	330,000,000	214,931,000	65.13
52	Penunjang DAK Sub. Bidang Air Minum dan Sanitasi	200,000,000	119,616,478	59.81
53	Penyusunan DED SPAM Permukiman Kota Tasikmalaya	120,000,000	98,710,300	82.26
54	Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Singkup	165,000,000	153,856,870	93.25
55	DAK - Reguler Bidang Air Minum (Dana Alokasi Khusus Tahun 2018)	2,100,035,000	1,993,645,000	94.93
56	DAK - Reguler Bidang Sanitasi (Dana Alokasi Khusus Tahun 2018)	1,514,330,000	1,503,087,500	99.26
57	DED Pembangunan sarana Air Bersih Wilayah Kota Tasikmalaya	774,000,000	62,628,500	8.09

Sasaran 2
Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sasaran II terdiri dari 1 Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.3
Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2017-2018
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Tasikmalaya

No	Tujuan	Uraian Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Kinerja		Target Akhir RPJMD
				2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase pertamanan dan pemakaman yang representative (%)	20	44,87	100

Target Persentase pertamanan dan pemakaman yang representative Tahun 2018 adalah sebesar 41,03%. Sedangkan realisasi Persentase pertamanan dan pemakaman yang representative tahun 2018 sebesar 44,87%. Tercapainya target Persentase pertamanan dan pemakaman yang representative, dilakukan melalui berbagai upaya sumber pendanaan yang berasal dari batuan APBD dan bantuan Provinsi.

Pada tahun 2018 pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman melakukan penataan pertamanan dan pemakaman antara lain:

1. Taman Depan Mesjid Agung.
2. Taman Dadaha
3. Median Jalan HZ. Mustopa
4. Median jalan Ardiwinangun
5. Tugu Adipura
6. lampu Cika cika
7. TPU Cieunteung
8. TPU Aisha Rashida

Dalam rangka pencapaian Indikator tersebut diatas dilaksanakan beberapa program/kegiatan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 3.4
Program dan Kegiatan untuk Pencapaian
Persentase pertamanan dan pemakaman yang representative

No	Prog/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1.500.000.000	1.449.591.750	96,64
1	Pemeliharaan Pemakaman Kota Tasikmalaya	300.000.000	291.929.000	97,31
2	Lanjutan Pemagaran TPU Cieunteung	200.000.000	198.916.000	99,46
3	Penataan Bangunan dan Lingkungan Taman Pemakaman Umum (TPU) Aisha Rashida	1.000.000.000	958.760.000	95,88
II	Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pertamanan dan Pemakaman	5.130.000.000	4.978.615.660	97,05
4	Pemeliharaan Pertamanan Kota Tasikmalaya	1.400.000.000	1.359.194.660	97,09
5	Penataan Median Jalan di Kota Tasikmalaya	1.600.000.000	1.548.764.000	96,80

6	Penataan Taman Balekota Tasikmalaya	1.500.000.000	1.455.642.000	97,04
7	Penataan Taman Jalan Dadaha	430.000.000	422.065.000	98,15
8	Pemindahan Tugu Adipura	200.000.000	192.950.000	96,48

BAB IV P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi serta sasaran selama tahun anggaran 2018. Dari hasil analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- a. Pencapaian sasaran-sasaran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya serta pencapaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan secara umum dapat dikategorikan baik.
- b. Efisiensi dan efektivitas sasaran dan kegiatan secara umum termasuk katagori baik.

4.2 Permasalahan

Dalam pelaksanaan Akuntabilitas yang bermuara pada penyusunan LKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan. Permasalahan dan hambatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua permasalahan pokok yaitu sumber daya manusia dan peralatan.

4.2.1 Sumber Daya Manusia

Berhubung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya sampai saat ini masih kekurangan tenaga ahli pertamanan, pertanahan, maka

perlu adanya penambahan pegawai negeri sipil yang ahli pada bidang-bidang tersebut, disamping tenaga lapangan untuk melayani pemeliharaan drainase dan pemakaman.

4.2.2 Peralatan

Sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya masih terbatas, antara lain masih kurangnya mobil tangga. Hal ini cukup penting guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas terutama sekali pada saat terjadi bencana alam seperti angin ribut yang menumbangkan pohon-pohon pelindung dipinggir jalan.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Agar tercapainya peningkatan kinerja dan akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, perlu adanya strategi untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut diatas, dengan strategi seperti :

4.3.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan penunjang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, yaitu dengan mengoptimalkan tenaga yang ada untuk mengikuti pelatihan sebelum adanya penambahan tenaga pegawai yang diperlukan.

4.3.2 Peralatan

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas baik yang sifatnya rutin maupun insidental dengan cara

memaksimalkan saranan yang ada untuk pemenuhan kegiatan dilapangan.

Diharapkan adanya penunjang alat-alat untuk menanggulangi kebutuhan di lapangan melalui anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya.